

Pelaksanaan Demokrasi Kekuasaan Politik Yang Informal Dan Tidak Bisa Diatur

Irmu Yunika^{1*}, Elsa Lorensa², Masduki Asbari³, Gunawan Santoso⁴, Meilanta Rantina⁵

^{1,3}Universitas Insan Pembangunan Indonesia

²Universitas Bina Bangsa

⁴Universitas Muhammadiyah Jakarta

⁵Universitas Muhammadiyah Cileungsi

*Corresponding email: yunikairmi0@gmail.com

Abstrak - Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perspektif Yudi Latif dari channel youtube CakNun yang berjudul “Demokrasi”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan melakukan simak catat karena sumber data yang diperoleh dengan menyimak narasi lisan. Hasil penelitian ini guna mengelola masyarakat untuk memilih demokrasi dalam memecahkan permasalahan manusia. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya untuk memperkuat institusi-institusi formal demokrasi, memperluas partisipasi politik, dan mendorong transparansi dan akuntabilitas. Pendidikan politik yang efektif juga dapat membantu warga negara memahami dan mengenali kekuasaan politik informal serta dampaknya terhadap demokrasi. Dengan demikian, perlu ada kesadaran dan tindakan kolektif untuk membangun demokrasi yang kuat, yang mengakui dan mengelola kekuasaan politik informal dengan cara yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri.

Kata kunci: Bahasa Indonesia, cerdas spiritual, Fahrudin Faiz, kajian filosofis, kasih sayang, menyimak.

Abstract - The purpose of this study is to find out Yudi Latif's perspective from the CakNun YouTube channel entitled "Democracy". This study used a descriptive qualitative method by observing notes because the source of the data was obtained by listening to oral narratives. The results of this study are used to manage society to choose democracy in solving human problems. To overcome this challenge, efforts are needed to strengthen formal democratic institutions, expand political participation, and promote transparency and accountability. Effective political education can also help citizens understand and recognize informal political power and its impact on democracy. Thus, there needs to be awareness and collective action to build a strong democracy, which recognizes and manages informal political power in a way that is in line with the principles of democracy itself.

Keywords: Political Power, Informal Political Power, Inequality

Pendahuluan

Mengapa perlu adanya demokrasi, kita perlu memahami bahwa setiap sistem politik di mana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat atau warga negara. Prinsip dasar demokrasi melibatkan partisipasi politik, pengambilan keputusan yang adil, perlindungan hak asasi manusia, dan akuntabilitas pemerintah. Demokrasi telah menjadi salah satu prinsip pemerintahan yang dianggap penting dalam banyak negara di seluruh dunia.

Produk yang dibuat oleh manusia atau sistem yang dibuat oleh manusia itu pasti memecahkan permasalahan manusia, terlebih lagi dibuat dengan sekompleks mungkin variasinya. Perlu kita

memahami pisau bedah dari ketajaman yang berbeda ada 5 level yang dapat menguraikan hal itu yang paling atas adalah kontekstual, konseptual, logic, fisik, kemudian detailnya (Martini et al., 2019). Namun, dalam praktiknya, terdapat juga kekuasaan politik informal yang tidak dapat diatur dengan cara yang sama seperti institusi-institusi formal (Santoso, Rahmawati, et al., 2023). Kekuasaan politik informal sering terjadi di tingkat lokal, kelompok masyarakat, atau dalam hubungan antarindividu. Contohnya termasuk pengaruh pribadi, nepotisme, patronase, dan pengaruh politik yang didasarkan pada kekayaan atau status sosial. Kekuasaan politik informal ini dapat menjadi tantangan bagi demokrasi karena mereka dapat menghasilkan ketidaksetaraan akses terhadap kekuasaan politik dan pengambilan keputusan yang tidak adil. Institusi-institusi formal demokrasi mungkin kehilangan legitimasi dan akuntabilitas ketika kekuasaan politik informal mendominasi proses politik.

Dalam konteks ini, penting untuk memahami dan mengenali kekuasaan politik informal serta dampaknya terhadap demokrasi. Upaya perlu dilakukan untuk memperkuat institusi-institusi formal demokrasi, memperluas partisipasi politik, dan mendorong transparansi dan akuntabilitas. Pendidikan politik yang efektif juga dapat membantu warga negara memahami pentingnya demokrasi dan bagaimana mereka dapat berperan dalam melindungi dan memperkuat sistem demokrasi.

Metode

Demokrasi melibatkan partisipasi politik, pengambilan keputusan yang adil, perlindungan hak asasi manusia, dan akuntabilitas pemerintah. Ini memungkinkan rakyat atau warga negara untuk memiliki kekuasaan politik dan berperan dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka (Santoso, Putri, et al., 2023). Ada juga kekuasaan politik informal yang tidak diatur secara formal. Kekuasaan politik informal ini seringkali terjadi di tingkat lokal, kelompok masyarakat, atau dalam hubungan antarindividu. Ini dapat berupa pengaruh pribadi, nepotisme, patronase, atau pengaruh politik yang didasarkan pada kekayaan atau status social (Santoso et al., 2022). Kekuasaan politik informal ini dapat menciptakan ketidaksetaraan akses terhadap kekuasaan politik dan pengambilan keputusan yang tidak adil. Kekuasaan politik informal ini dapat menjadi tantangan bagi demokrasi karena dapat mengurangi legitimasi dan akuntabilitas institusi-institusi formal. Oleh karena itu, penting untuk mengenali dan memahami kekuasaan politik informal ini serta dampaknya terhadap demokrasi. Langkah-langkah perlu diambil untuk memperkuat institusi-institusi formal demokrasi, memperluas partisipasi politik, dan mendorong transparansi serta akuntabilitas.

Hasil dan Pembahasan

Kekuasaan politik informal sering kali sulit untuk diatur atau dikendalikan sepenuhnya karena mereka beroperasi di luar kerangka hukum dan regulasi resmi (Santoso, Azrasabiy, et al., 2023).

Mereka sering kali terjadi dalam lingkungan politik yang korup dan lemahnya penegakan hukum. Penting untuk memperkuat lembaga-lembaga demokratis, mempromosikan transparansi, dan memperkuat prinsip-prinsip akuntabilitas untuk mengurangi pengaruh kekuasaan politik informal ini.

Berikut contoh dari kekuasaan politik informal yaitu sebagai berikut: Ketidakadilan: Kekuasaan politik informal dapat mengakibatkan ketidakadilan dalam sistem politik (Santoso, Muzaqi, et al., 2023). Praktik patronase dan nepotisme dapat mengabaikan kualifikasi dan kompetensi, sehingga orang-orang yang pantas mendapatkan posisi atau keuntungan tertentu diabaikan. Hal ini mengurangi kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga politik. Korupsi: Salah satu dampak yang paling merugikan dari kekuasaan politik informal adalah korupsi. Praktik korupsi merusak integritas lembaga-lembaga demokratis dan mempengaruhi pemerintahan yang baik. Korupsi mengalihkan dana publik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat menjadi keuntungan pribadi, yang pada akhirnya merugikan masyarakat secara keseluruhan.

Partisipasi masyarakat yang terbatas: Kekuasaan politik informal dapat menyebabkan partisipasi masyarakat dalam proses politik menjadi terbatas (Santoso, Karim, et al., 2023). Ketika kekuatan berada dalam tangan kelompok-kelompok lobi atau individu yang memiliki sumber daya finansial yang kuat, suara dan aspirasi masyarakat umum sering kali terpinggirkan. Hal ini mengurangi representasi yang adil dan pluralisme dalam pengambilan keputusan politik. Merusak kepercayaan masyarakat: Keberadaan kekuasaan politik informal yang tidak dapat diatur merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga politik. Ketika masyarakat melihat praktik-praktik yang tidak adil, korupsi, dan politik uang yang merajalela, mereka cenderung kehilangan keyakinan dan partisipasi dalam proses politik. Hal ini dapat memperburuk polarisasi dan meningkatkan ketidakstabilan politik.

Kesimpulan

Bahwa pelaksanaan demokrasi yang melibatkan kekuasaan politik informal dan tidak teratur dapat memiliki dampak negatif pada sistem politik. Praktik-praktik seperti patronase, nepotisme, korupsi, politik uang, dan pengaruh kelompok-kelompok lobi yang kuat dapat merusak prinsip-prinsip demokrasi, mengurangi partisipasi masyarakat, merugikan keadilan, dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga politik. Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk memperkuat lembaga-lembaga demokratis, mendorong transparansi, meningkatkan akuntabilitas, dan memperkuat penegakan hukum. Reformasi politik yang bertujuan untuk mengurangi pengaruh kekuasaan politik informal, membatasi praktik korupsi, dan meningkatkan partisipasi masyarakat adalah langkah-langkah yang perlu diambil. Kesadaran masyarakat terhadap hak-hak politik mereka juga sangat penting, agar mereka dapat berperan aktif dalam mengawasi dan mengendalikan kekuasaan politik yang tidak formal dan tidak teratur. Hanya dengan mengatasi kekuasaan politik informal, demokrasi

dapat bekerja secara efektif untuk mewujudkan kepentingan dan aspirasi masyarakat secara adil dan inklusif.

Referensi

- Aryanto, Vincent Didiek Wiet. *Marketing Digital: Solusi Bisnis Masa Kini dan Masa Depan*. PT Kanisius, 2020.
- Arifin, Zainul. *Pengaruh Orientasi Belanja, Kepercayaan Online, dan Pengalaman Pembelian Terhadap Minat Beli Secara Online (Studi Pada Konsumen Toko Online JD, ID)*. Diss. STIE Malangkececwara, 2021.
- Ayu, Sandra, and Ahmad Lahmi. "Peran e-commerce terhadap perekonomian Indonesia selama pandemi Covid-19." *Jurnal Kajian Manajemen Bisnis* 9.2 (2020): 114-123.
- Martini, E., Kusnadi, E., Darkam, D., & Santoso, G. (2019). Competency Based Citizenship 21st Century Technology in Indonesia. *International Journal of Recent Technology and Engineering*, 8(1C2), 759–763. <https://doi.org/10.35940/ijrte.b1483.0882s819>
- Santoso, G., Abdulkarim, A., Maftuh, B., & Murod, M. (2022). Citizenship Education Perspective : Strengths , Weaknesses , And Paradigm of the Curriculum in 2022. *Proceedings of the 1st Pedagogika International Conference on Educational Innovation, PICEI 2022, 15 September 2022, Gorontalo, Indonesia*, 2. <https://doi.org/10.4108/eai.15-9-2022.2335929>
- Santoso, G., Azrasabiy, H., Ramadhana, L., & Apriatna, N. G. (2023). *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra) Kakarakteristik Karakter Pahlawan Nasional dan Daerah Republik Indonesia Zaman Prakemerdekaan Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra). 02(02), 256–268.*
- Santoso, G., Karim, A. A., Maftuh, B., & Murod, M. (2023). Kajian Penegakan Hukum di Indonesia untuk Membentuk Perdamaian dalam Bhinneka Tunggal Ika Indonesia Abad 21. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 02(01), 210–223.
- Santoso, G., Muzaqi, A., Raihan, M., & Mahesa, S. F. (2023). *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra) Dampak Positif Sumpah Pemuda pada Organisasi Besar di Indonesia Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra). 02(02), 194–202.*
- Santoso, G., Putri, J. N., Jannah, M., Sekar, N., & Prasaja, R. (2023). Bhinneka Tunggal Ika Pondasi Semangat Gotong Royong Bangsa. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra), 02(02), 173–183.*
- Santoso, G., Rahmawati, P., Murod, M., & Setiyaningsih, D. (2023). Hubungan Lingkungan Sekolah dengan Karakter Sopan Santun Siswa. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 02(01), 91–99. <https://jupetra.org/index.php/jpt/article/view/131/36>